

**BAGIAN II**  
**PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI**  
**SARANA PEMBINAAN MORAL**

**A. Tata Tertib**

**1. Pengertian Tata tertib**

Tata tertib sekolah adalah suatu peraturan yang digunakan pihak sekolah untuk mengatur siswanya. Tata tertib sekolah dibuat agar dapat terlaksananya kurikulum secara baik yang mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa, sebagai salah satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Tata tertib sekolah menjadi rambu-rambu kehidupan bagi siswa ketika berada di sekolah - sekolah. Agar tata tertib yang dibuat sekolah dapat berjalan sesuai fungsinya maka pihak sekolah juga memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman, pemberian skor, dll. Dengan adanya pemberian sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi pelanggaran untuk kedua kalinya. Pelaksanaan tata tertib dapat dikatakan telah berjalan baik jika hampir semua siswa dapat menaati dan melaksanakan tata tertib tersebut dengan baik. Namun jika masih banyak yang melanggar tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah maka dapat dikatakan pelaksanaan tata tertib di sekolah tersebut kurang berjalan dengan baik.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen yaitu siswa, guru, kepala sekolah, staff tata

usaha, benda-benda dan lain sebagainya. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa siswa, guru dan kepala sekolah secara bersama-sama berada dalam satu lembaga, dan bersama-sama pula mengatur dan membina serta menyelenggarakan program-program yang ditentukan dan diatur oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam upaya memudahkan pelaksanaan program yang sudah ada, maka sekolah membuat peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting didalam penegakan peraturan dan tata tertib sekolah. Tingkat kesadaran akan kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tata tertib sekolah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002:1185) menyebutkan bahwa tata tertib mengandung kumpulan atau kaidah menurut peraturan.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2005:145), tata tertib adalah sekumpulan aturan - aturan yang ditujukan oleh semua komponen di dalam suatu lembaga atau organisasi agar selalu tunduk dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika Guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib

sekolah merupakan kumpulan aturan - aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Dari beberapa pengertian tentang tata tertib di atas, dapat disimpulkan bahwa tata tertib adalah suatu aturan atau kaidah yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut di sekolah dan masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen yang berada di dalamnya. Dengan adanya peraturan tata tertib tersebut diharapkan dapat dijadikan rambu-rambu dalam berperilaku bagi semua individu dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah, misalnya bagaimana siswa berperilaku terhadap sesama teman, guru, kepala sekolah dan semua komponen yang ada di dalamnya.

## **2. Fungsi Dan Tujuan Tata Tertib**

Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.

- b. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
- c. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh - sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah.

Sedangkan fungsi dari tata tertib sekolah menurut Hurlock (2001:85), adalah wujud dari peraturan sekolah yang mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk yang bermoral:

- 1) Fungsi yang pertama adalah bahwa peraturan mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut, misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan menerima dan mendapat bantuan dalam fungsi sekolahnya bahwa menyerahkan tugas yang dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode yang dapat diterima sekolah untuk menilai prestasinya.
- 2) Fungsi yang kedua adalah peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Bila peraturan keluarga mengatur bahwa tidak seorang anakpun boleh mengambil mainan milik saudaranya tanpa pengetahuan dan ijin sipemilik, maka anak akan segera ditegur bahwa hal ini dianggap perilaku yang tidak baik

Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi tersebut di atas, peraturan itu harus dimengerti, diingat dan diterima oleh si anak. Bila peraturan diberikan dalam kata-kata yang tidak dimengerti atau hanya sebagai pedoman

perilaku sehingga gagal mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Sebagai pedoman perilaku belajar siswa dalam berhubungan dengan semua lingkungan di sekolah. Begitu juga di SMA Taman Mulia Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah memiliki tata tertib sekolah yang ditujukan kepada siswa agar mereka selalu menunjukkan perilaku belajar di sekolah sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam tata tertib sekolah, berdasarkan pada pendapat tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tata tertib sekolah berfungsi untuk mengintegrasikan anggota masyarakat sekolah dan untuk mengatur serta mengendalikan perilaku siswa di sekolah agar terciptakeadaan yang tenang, tertib, terkendali sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap lembaga apapun namanya dalam mengendalikan segala sesuatu tertentu pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Demikian halnya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam mengadakan mengatur tata tertib juga ada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah agar tercipta suasana sekolah yang kondusif, guru mampu melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal, siswa mampu mengembangkan identitas keberhasilan sehingga membentuk watak disiplin, mandiri, dan santun, serta membentuk rasa hormat kepada kepala sekolah, guru, orang tua, maupun sesama teman.

### 3. Bentuk Perilaku Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Menurut Willis (2004:31), klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dimulai dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran berat. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut

- a. Pelanggaran ringan seperti membolos, malas belajar, kesulitan belajar bidang pelajaran tertentu, bertengkar, berkelahi, suka ramai di dalam kelas, tidak mengerjakan tugas atau PR, terlambat datang ke sekolah, tidak ikut upacara bendera tanpa alasan yang jelas.
- b. Pelanggaran sedang seperti berpacaran, berkelahi antar sekolah lain, menyalahgunakan uang SPP, merokok.
- c. Pelanggaran berat seperti membawa minuman keras, narkoba, membawa senjata tajam, hamil, menodong dan perilaku lain yang mengarah pada tindakan kriminal.

Djiwandono (2002:307), menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran atau gangguan tata tertib yang sering dilakukan oleh siswa antara lain : bicara di kelas, keluar kelas tanpa izin, gagal mengikuti aturan kelas dan tidak ada perhatian.

Lebih lanjut Soesilowindrarini (2003:194), menyebutkan bahwa sikap tidak perhatian adalah: mengganggu guru sehingga membuat guru menjadi jengkel, tidak membuat PR, berbisik-bisik saat diterangkan, merokok di toilet, mencontek, membolos dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku pelanggaran terhadap tata tertib sekolah adalah bentuk perilaku yang tidak diinginkan oleh penyelenggaraan sekolah. Bentuk perilaku pelanggaran tata tertib sekolah seperti membolos, berkelahi, terlambat, membuat gaduh di dalam kelas, tidak mengerjakan PR, mencontek, membantah perintah guru, tidak membawa buku-buku maupun alat-alat pelajaran sekolah, tidak mengikuti upacara, tidak mengerjakan tugas piket, merokok, merusak benda-benda milik sekolah, pencurian, membawa barang-barang terlarang misalnya senjata tajam, gambar porno, dan lain sebagainya, semua itu termasuk jenis-jenis pelanggaran tata tertib sekolah.

Penelitian ini mengubah bentuk perilaku melanggar tata tertib sekolah menjadi perilaku yang mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Dengan kata lain siswa diharapkan mampu disiplin dalam mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Dengan demikian orang yang disiplin akan berperilaku selalu mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari sekolah tersebut. Dalam penelitian ini perilaku yang ingin dimunculkan adalah bentuk perilaku tertib yang berupa tidak terlambat sekolah, selalu beratribut lengkap, tidak membolos, dan tidak gaduh baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan selalu mengerjakan segala bentuk tugas atau PR yang diberikan dengan baik.

#### **4. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Tata Tertib Siswa**

SMA termasuk dalam remaja awal, masuk dalam usia 15-17 tahun yang disebut sebagai fase remaja (Rochmah, 2005:178).

Hurlock ( 2001:212 ) mengatakan bahwa secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “ badai dan tekanan “ suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Hurlock juga menyebutkan bahwa perubahan awal pada remaja yang bersifat universal :

- a. Meningkatnya emosi Intensitas meningkatnya emosi tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi karena perubahan emosi biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja.
- b. Perubahan Tubuh.
- c. Minat Dan Peran Remaja akan merasa selalu banyak masalah dan masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan lebih sulit untuk diselesaikan. Remaja akan tetap merasa mengalami banyak masalah sampai ia sendiri yang menyelesaikannya menurut kepuasannya.
- d. Perubahan Minat Dan Pola Perilaku Perubahan minat dan pola perilaku diharapkan tetap dipertahankan, apa yang pada masa kanak - kanak dianggap penting sekarang sudah tidak dianggap lagi. Misalnya, sebagian remaja tidak lagi menganggap bahwa banyaknya teman merupakan petunjuk popularitas yang lebih penting dari sifat-sifat yang dikagumi dan dihargai oleh teman - temannya sebaya.
- e. Sikap ambivalen terhadap setiap perubahan Remaja menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.



Dari ciri - ciri karakteristik siswa remaja seperti tersebut makaterdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, oleh siswa di sekolah menengah pertama itu. Hurlock mengatakan faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikanyaitu:

1. Sikap teman sebaya
2. Sikap Orang Tua
3. Nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan akademis
4. Relevansi atau nilai praktis dari berbagai mata pelajaran
5. Sikap terhadap guru dan seluruh komponen yang ada di sekolah termasuk kebijakan akademis dan kedisiplinan
6. Keberhasilan dalam bernagai kegiatan ekstrakurikuler
7. Derajat dukungan social di antara teman-teman sekelas

Dengan demikian jelas bahwa pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor tersebut di atas.

## **B. Pembinaan Moral**

### **1. Pengertian pembinaan**

Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik yang menunjukkan adanya peningkatan atau kemajuan atas berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan pembinaan juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang

lebih baik lagi. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh hasil yang baik.

## **2. Upaya pembinaan**

Untuk menjadikan siswa memiliki kepribadian yang baik, diperlukan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan di sekolah. Pembinaan akan berhasil apabila dilakukan dengan usaha keras dari guru serta orang tua dan masyarakat.

Menurut Nurul Zuriah ( 2007 : 80) upaya pembinaan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang tepat, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif, dialogis, komunikatif, serta keterbukaan, selain itu peningkatan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat juga menjadi tanggung jawab bersama.

## **3. Sifat pembinaan**

Menurut Nurul Zuriah ( 2007: 82) sifat dalam pembiaian yaitu bekerja keras, berdisiplin, beriman,bersyukur, bertanggung jawab, tenggang rasa, cermat, jujur, menghargai karya orang lain, menghargai waktu, pengendalian diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, tertib, sopan santun, sportif, susila, tegas, tekun, tangguh, dan tepat janji.

## **4. Pengertian moral**

Moral berasal dari kata “mos” atau “mores” (jamak) dari bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau tingkah laku. Dalam bahasa Yunani moral dikenal dengan kata “ethos” yang selanjutnya menurunkan istilah etika. Dalam bahasa Arab, moral dikenal dengan

istilah “akhlak” yang selanjutnya dikenal dengan budi pekerti. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku baku dalam hidup. Oleh Magnis Suseno dalam Asri Budiningsih (2008: 24) dikatakan bahwa ”kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia”.

Menurut Kaelan (2004: 93) moral adalah “suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik”. Selanjutnya Sjarkawi (2006: 28) mengatakan ”moral diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar-tidak atau baik-tidaknya tindakan manusia”.

Definisi lain menurut Poerwodarminta dalam Hamid Darmadi (2009: 50) mengatakan ”moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau kelakuan”. Dapat dilihat bahwa moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan demikian moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Perlu diingat baik dan benar menurut seseorang, tidak pasti baik dan benar menurut orang lain. Karena itulah diperlukan adanya prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebenarannya dan kebaikan oleh semua orang. Jadi jelas, moral dipakai untuk memberikan penilaian atau predikat tingkah laku seseorang.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah kumpulan peraturan tentang bagaimana manusia harus bertingkah laku yang baik dalam hidup atau dengan kata lain perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik dan buruk. Moral pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam pergaulan dengan sesama manusia dan masyarakat, akhirnya terbentuk moral dengan melalui tahap-tahap perkembangan.

## **5. Tahap Perkembangan Moral**

Menurut L. Kohlberg dalam K. Bertens (2007: 80-84) mengemukakan enam tahap perkembangan moral dapat dikaitkan satu sama lain dalam tiga tingkat (levels) berturut-turut yakni "tingkat prakonvensional, tingkat konvensional dan tingkat pascakonvensional". Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Tingkat Prakonvensional**

Pada tingkat ini si anak mengakui adanya aturan-aturan yang baik serta buruk mulai mempunyai arti baginya, tetapi hal itu semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Penilaian tentang baik buruknya perbuatan hanya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Motivasi untuk penilaian moral terhadap perbuatan hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh perilaku si anak hukuman atau ganjaran. Pada tingkat konvensional ini dapat dibedakan dua tahap, yaitu:

Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan. The Punishment and obidience orientation yaitu patuh karena tata hukuman. Anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret (orang tua, guru) dan atas hukuman yang akan menyusul, bila ia tidak patuh.

Tahap 2: Orientasi relativis instrumental. The Instrumental Relatives Orientation yaitu patuh sekedar memuaskan orang lain atau alasan pragmatis-pragmatis saja. Perbuatan adalah baik, jika instrumen atau alat dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga, tapi hubungan antara manusia dianggapnya seperti hubungan orang di pasar: tukar-menukar.

## 2) Tingkat Konvensional

Penelitian Kohlberg menunjukkan bahwa biasanya (tapi tidak selalu) anak mulai beralih ke tingkat ini antara umur sepuluh dan tiga

belas tahun. Di sini perbuatan-perbuatan mulai dinilai atas dasar norma-norma umum dan kewajiban serta otoritas dijunjung tinggi. Tingkat ini oleh Kohlberg disebut "konvensional", karena di sini anak mulai menyesuaikan (bahasa Latin: *convenire*) penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Singkatnya anak mengidentifikasi diri dengan kelompok sosialnya beserta norma-normanya. Tingkat ke dua ini juga mencakup dua tahap:

Tahap 1 Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi "anak manis". Interpersonal Concordance. Anak cenderung mengarahkan diri pada keinginan serta harapan dari para anggota keluarga atau kelompok lain (sekolah di sini tentu penting). Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Anak mengambil sikap: saya adalah "anak manis" (good boy-nice girl), artinya, ia adalah sebagaimana diharapkan oleh orang tua, guru dan sebagainya ia ingin bertingkah laku secara "wajar", artinya, menurut norma-norma yang berlaku. Jika ia melanggar norma-norma kelompoknya, ia merasa malu dan beresalah.

Tahap 2 Orientasi hukum dan ketertiban Law and Order Orientation. Paham "kelompok" dengan mana anak harus menyesuaikan diri di sini diperluas: dari kelompok akrab (artinya, orang-orang

yang dikenal oleh anak secara pribadi) ke kelompok yang lebih abstrak, seperti suku bangsa dan agama. Tekanan diberikan pada aturan-aturan tetap, otoritas dan pertahanan ketertiban sosial. Perilaku yang baik adalah melakukan kewajibannya, menghormati otoritas dan mempertahankan ketertiban sosial yang berlaku demi ketertiban itu sendiri. Orang yang melakukan aturan-aturan tradisional atau menyimpang dari ketertiban sosial jelas bersalah.

### 3) Tingkat Pascakonvensional

Oleh Kohlberg tahap ini disebut juga "tingkat otonom" atau "tingkat berprinsip" (principled level). Pada tingkat ketiga ini hidup moral dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Norma-norma yang ditentukan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berlaku, tapi harus dinilai atas dasar prinsip-prinsip yang mekar dari kebebasan pribadi. Tingkat ketiga ini pun mempunyai dua tahap:

Tahap 1 Orientasi kontrak-sosial legalistik. Social Contract legalistik orientation. Di sini disadari relativisme nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Dising apa yang disetujui secara demokratis, baik buruknya tergantung pada nilai-nilai dan pendapat pribadi. Segi hukum ditekankan, tapi diperhatikan secara khusus kemungkinan untuk mengubah hukum, asal hal

itu terjadi demi kegunaan sosial (berbeda dengan pandangan suku tentang law and order.

Tahap 2 Selain bidang hukum, persetujuan bebas dan perjanjian adalah unsur pengikat bagi kewajiban.

Tahap 3 Orientasi prinsip etika yang universal. Universal ethical principle orientation. Di sini orang mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Yang mencolok adalah bahwa prinsip-prinsip etis dan hati nurani berlaku secara universal. Pada dasarnya prinsip-prinsip ini menyangkut keadilan, kesediaan membantu satu sama lain, persamaan hak manusia dan hormat untuk martabat manusia sebagai pribadi. Orang yang melanggar prinsip-prinsip hati nurani ini akan mengalami penyesalan yang mendalam (remorse). Ia mengutuk dirinya, karena tidak mengikuti keyakinan moralnya sendiri. Menurut Kohlberg, penelitiannya telah menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang mencapai tahap keenam ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan perbuatan moral sebagai patuh pada aturan untuk menghindari hukuman menyesuaikan diri (conform) untuk mendapatkan ganjaran, kebajikannya dibalas dan seterusnya menyesuaikan diri untuk menghindari ketidaksetujuan, ketidaksenangan orang lain menyesuaikan diri untuk menghindari penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang



menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri

## 6. Nilai Moral

Hamid Darmadi (2009: 27-28) berpendapat "nilai adalah sesuatu yang berharga baik menurut standard logika (benar-salah), estetika (baik- buruk), etika (adli/layak-tidak adil), agama (dosa dan haram-halal) serta menjadi acuan dan atas sistem keyakinan diri maupun kehidupan". Nilai atau "value" (bahasa Inggris) termasuk dalam bidang kajian filsafat. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" (worth) atau kebaikan "goodness", dan kata kerja yang artinya suatu kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. (Fransena dalam Hamid Darmadi, 2009: 67).

Menurut Winarno (2006: 5) "nilai merupakan sesuatu yang baik yang dicitakan manusia". Di dalam Dictionary of sociology and Related Sciences dikemukakan bahwa "nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia" (Hamid Darmadi, 2009: 67). Jadi nilai itu pada hakekatnya sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. "Sesuatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu" (Kaelan, 2004: 87).

Menurut Notonegoro dalam Hamid Darmadi (2009: 68) membagi nilai menjadi tiga macam:

- 1) Nilai material; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani dan manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.
- 2) Nilai vital; segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, nilai kerohanian dapat dibedakan atas empat macam yaitu:
  - a. Nilai kesabaran; bersumber pada akal (ratio,budi, cipta) manusia.
  - b. Nilai keindahan atau estetis; bersumber pada unsur perasaan (estethis, gevoel, rasa) manusia.
  - c. Nilai kebaikan atau nilai moral; bersumber pada unsur kehendak (wii, wollen, karsa) manusia
  - d. Nilai religius; merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak.

Setelah mengetahui pengertian nilai selanjutnya mengenai pengertian moral, menurut Hamid Darmadi (2009: 50) moral adalah "ajaran baik buruk perbuatan dan kelakuan". Moral juga merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu dalam pergaulan.

Sebagai dua istilah yang memiliki kaitan satu dengan lainnya, nilai dan moral sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dalam konteks tertentu nilai dan moral sering disatukan menjadi nilai moral. Menurut Banu Supatono (2007: 16) "nilai moral adalah penilaian tentang tindakan manusia sebagai manusia tentang yang baik dan buruk dimana nilai moral tersebut telah diyakini oleh anggota dalam masyarakat". Hal senada diungkapkan

oleh Sjarkawi (2006: 29) bahwa "nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan nilai moral adalah suatu nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan memberikan penilaian terhadap tingkah laku manusia. Tidak semua nilai adalah nilai moral, tetapi nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal yang baik dan buruk. Sehingga terdapat ciri-ciri terkait dengan nilai moral.

